

PENGANTAR

Pertanggungjawaban pencapaian kinerja KPKNL Tangerang I selama tahun 2021 dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 yang disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan Nomor 53/2014).

Laporan Kinerja merupakan perwujudan dari hasil setiap kegiatan yang dilakukan, yang harus dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan tingkat keberhasilan yang diharapkan atau mendeteksi kegagalan yang dialami dalam pelaksanaan setiap tugas.

Pelaksanaan tugas yang dilakukan KPKNL Tangerang I selalu dilandaskan pada visi yang telah ditetapkan yaitu : “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di wilayah kerja KPKNL”.

Menjadi yang terbaik adalah harapan yang selalu terus akan diusahakan untuk dicapai yang tentunya akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan tuntutan dan harapan yang ada dan terjadi pada masyarakat.

Perwujudan untuk menjadi yang terbaik dalam Tahun 2021 dilaporkan dalam Laporan Kinerja KPKNL Tangerang I Tahun 2021 guna memberikan pertanggungjawaban atas visi dan misi yang telah diemban.

Tangerang, 28 Januari 2022
Kepala KPKNL Tangerang I



Ditandatangani secara elektronik
Ririen Fransiska

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pencapaian Kinerja KPKNL Tangerang I dalam mengelola kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang disajikan melalui Laporan Kinerja KPKNL Tangerang I Tahun 2021. Laporan Kinerja KPKNL Tangerang I yang disusun pada tahun 2021 berisikan capaian kinerja selama periode tahun 2021, sehingga laporan tersebut merupakan bahan monitoring dan evaluasi serta basis perencanaan kinerja tahun berikutnya dalam rangka pencapaian Visi DJKN yaitu :

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di wilayah kerja KPKNL”.

Dalam mewujudkan visi tersebut diperlukan langkah-langkah untuk mengantisipasi setiap perkembangan dan tuntutan yang tinggi yang saat ini terjadi pada masyarakat. Tindakan dan langkah untuk memperbaiki, menyempurnakan dan menyederhanakan setiap kegiatan dan sistem administrasi sehingga setiap pelayanan yang dilakukan dapat diketahui secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari hasil yang dicapai.

Laporan Kinerja KPKNL Tangerang I tahun 2021 menyajikan capaian dari 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama selama periode 2021.

Terdapat pula capaian lainnya berupa penghargaan Satuan Kerja Terbaik Kedua dalam Kinerja Indikator Deviasi Halaman III DIPA Tahun 2021 oleh KPPN Tangerang

Pencapaian Kinerja KPKNL Tangerang I tahun 2021 dilakukan melalui evaluasi dan pengukuran sasaran dan kinerja kegiatan. Evaluasi dan pengukuran kinerja tersebut dilakukan melalui pengukuran pencapaian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama Kemenkeu *Three* KPKNL.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

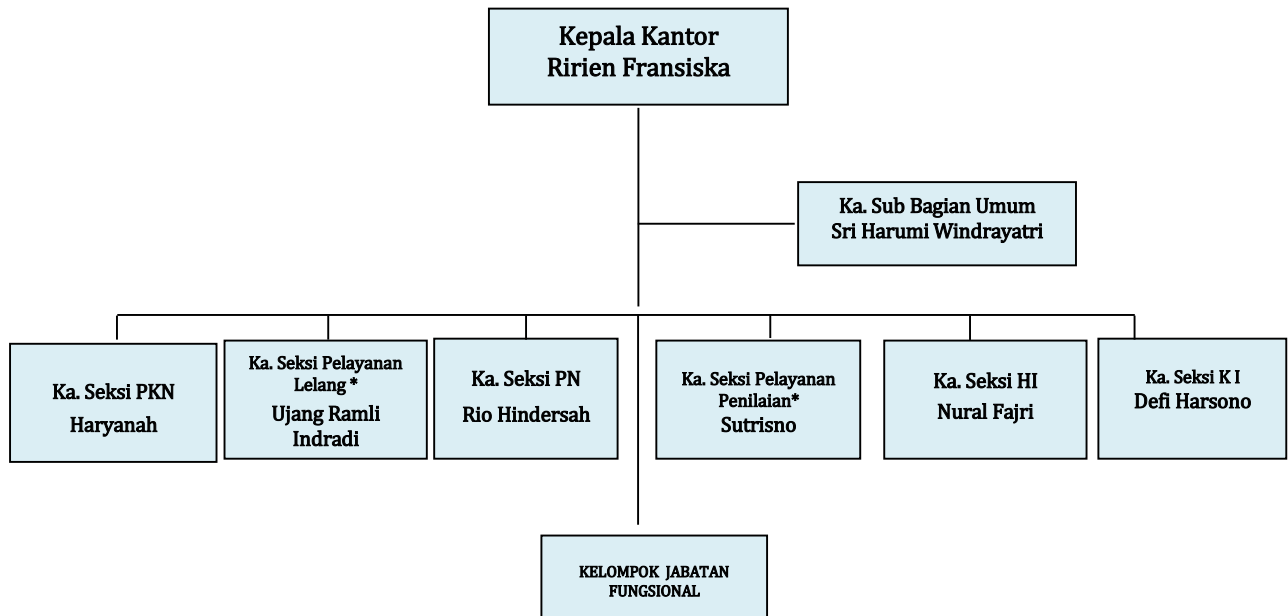
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang I adalah unit operasional yang merupakan Instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai unit eselon I dalam lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Peraturan dimaksud dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang dinyatakan berlaku tanggal 28 Oktober 2021).

KPKNL Tangerang I berkedudukan di Kota Tangerang, dengan tugas pokoknya adalah melaksanakan pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dengan wilayah kerja meliputi wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, yang merupakan fungsi operasional dari Instansi Vertikal Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Banten.

KPKNL Tangerang I mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Struktur organisasi KPKNL terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum
2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
3. Seksi Pelayanan Penilaian* (hapus sesuai PMK 154/PMK.01/2021)
4. Seksi Piutang Negara
5. Seksi Pelayanan Lelang* (hapus sesuai PMK 154/PMK.01/2021)
6. Seksi Hukum dan Informasi
7. Seksi Kepatuhan Internal

Bagan Struktur Organisasi
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang



Kekuatan Sebagai Sumber Daya Manusia yang Ada

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai KPKNL Tangerang I per 31 Desember 2021 sebanyak 30 (tiga puluh) orang pegawai, dengan rincian sebagai berikut:

I. Berdasarkan Golongan :

No.	Golongan	Laki - Laki	Perempuan	Total Orang
1.	I	0	0	0
2.	II	2	2	4
3.	III	11	12	23
4.	IV	2	1	3
TOTAL		15	15	30

I. Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Eselon			
			II	III	IV	Pelaksana
1	Kepala Kantor	1	-	1	-	
2	Subbagian Umum	5	-	-	1	4
3	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	3	-	-	1	2
4	Seksi Pelayanan Penilaian *	4	-	-	1	3
5	Seksi Piutang Negara	3	-	-	1	2
6	Seksi Pelayanan Lelang *	4	-	-	1	3
7	Seksi Hukum dan Informasi	6	-	-	1	5
8	Seksi Kepatuhan Internal	4	-	-	1	3
	TOTAL	30	-	1	7	22

II. Berdasarkan Jabatan Fungsional dan Khusus

No	Bendahara	Juru Sita	Pelelang	Penilai
1.	2	1	2	2

Dalam melaksanakan tugas, KPKNL Tangerang I menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
- d. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung

- hutang dan/atau penjamin hutang serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
- e. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
 - f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
 - g. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
 - h. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
 - i. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
 - j. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
 - k. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
 - l. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
 - m. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
 - n. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

KPKNL Tangerang I sebagai instansi vertikal DJKN melaksanakan fungsi operasional pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang adalah melakukan tugas-tugas tersebut secara optimal. Pelaksanaan tugas pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang didasarkan pada visi yang telah ditetapkan dan hendak dicapai oleh KPKNL Tangerang I sejalan dengan Visi DJKN, yaitu **“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di wilayah kerja KPKNL”**.

Dalam mewujudkan visi tersebut diperlukan langkah-langkah untuk mengantisipasi setiap perkembangan dan tuntutan yang tinggi yang saat ini terjadi pada masyarakat. Tindakan dan langkah untuk memperbaiki, menyempurnakan dan menyederhanakan setiap kegiatan dan sistem administrasi sehingga setiap pelayanan yang dilakukan dapat diketahui secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari hasil yang dicapai.

Tindakan dan langkah serta hasil yang dicapai merupakan tolok ukur keberhasilan instansi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi atau sesuai mandat yang diemban sehingga setiap langkah yang ditempuh dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk tanggungjawab kepada masyarakat.

Pertanggungjawaban atas setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan tugas tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014) dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja KPKNL Tangerang I Tahun 2021.

B. Peran Strategis KPKNL Tangerang I

Seperti telah disebutkan di atas bahwa KPKNL sebagai lembaga yang melayani penilaian, pengelolaan kekayaan negara, serta pengurusan piutang negara dan lelang, senantiasa mengupayakan tugas pelayanan tersebut dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat.

Dengan pelaksanaan tugasnya tersebut dapat memberikan hasil pada peningkatan pendapatan dari sektor penerimaan bukan pajak (PNBP) melalui pelelangan maupun pelunasan piutang negara, serta pemanfaatan kekayaan negara yang *idle* pada Kementerian/Lembaga.

Pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang dapat menghasilkan penerimaan negara yang tentunya akan sangat strategis artinya bagi pembiayaan pembangunan serta memberikan layanan pada masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu setiap pelayanan yang diberikan oleh KPKNL Tangerang I membawa peran strategis tidak hanya bagi kepentingan pemerintah tetapi juga bagi kepentingan masyarakat yang dilayani.

Kepentingan-kepentingan tersebut terwakili pada instansi-instansi pengguna jasa KPKNL yang di antaranya adalah Para Penyerah Piutang yaitu Lembaga-lembaga Perbankan baik secara langsung maupun tidak langsung milik pemerintah serta lembaga non perbankan seperti instansi pemerintah lainnya serta masyarakat secara langsung

yang memerlukan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

Peran KPKNL tersebut tentu saja harus didukung dengan sarana dan prasarana yang menunjang. Sarana dan prasarana yang saat ini dimiliki oleh KPKNL Tangerang I merupakan modal dan landasan yang penting untuk mendukung tercapainya visi dan misi instansi.

C. Sistematika Pelaporan

Laporan Kinerja Tahunan 2021 ini kami sajikan dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Penjelasan Umum Organisasi KPKNL Tangerang I, Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berisi tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP

Berisi simpulan umum tentang capaian kinerja tahun 2021, serta langkah-langkah yang dilakukan untuk peningkatan kinerja.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Pelaporan kinerja instansi pemerintah didasarkan pada perencanaan sistematis sehingga pelaporan kinerja merupakan hasil evaluasi selama pelaksanaan rencana tersebut. Perencanaan sistematis yang berkelanjutan merupakan perencanaan stratejik dari langkah-langkah yang akan ditempuh oleh instansi untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik yang disusun untuk kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang saat ini dihadapi maupun yang akan timbul. Rencana stratejik KPKNL Tangerang I terwujud dalam visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mengantisipasi keadaan saat ini dan perkembangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

Visi yang ditetapkan KPKNL Tangerang I sejalan dengan visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam perencanaan stratejik yang akan dicapai adalah : ” **Menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di wilayah kerja KPKNL**”. Visi dimaksud merupakan kristalisasi dari semangat dan sekaligus menjadi komitmen seluruh jajaran DJKN dalam melaksanakan tugas.

Dari visi yang ditetapkan tersebut, dapat diuraikan ke dalam phrasa sebagai berikut :

Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai lembaga/institusi pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan para *stakeholder* dalam hal penilaian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan dan penatausahaan kekayaan negara termasuk dalam hal pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang. Hal ini sesuai dengan konsep dimana pengurusan piutang negara termasuk *asset management* dan lelang termasuk *asset disposal*. Selain itu, lelang sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan transaksi masyarakat.

Profesional adalah bahwa tugas-tugas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan.

Bertanggung jawab adalah bahwa pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, merupakan cita-cita dan arah dari tujuan akhir pengelolaan kekayaan negara sesuai dengan jiwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka KPKNL Tangerang I menetapkan Misi yang merupakan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang terdiri dari :

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan penilaian;
4. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
5. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Dalam melaksanakan misi yang telah dinyatakan untuk mewujudkan visi KPKNL Tangerang I maka perlu diperhitungkan secara cermat segala potensi, peluang dan kendala yang dimiliki dan akan dihadapi yang melingkupi lingkungan kerja KPKNL Tangerang I. Hasil perhitungan secara cermat dan analisis atas faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dilakukan atas kondisi internal dan eksternal yang melingkupi lingkungan kerja KPKNL Tangerang I. Analisis atas kondisi internal, eksternal dan strategi yang berupa potensi, peluang dan kendala dijelaskan sebagai berikut :

1. Strengths

- a. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai
- b. Struktur organisasi yang meningkatkan efisiensi pengurusan piutang negara dan lelang

2. Weakness

- a. Kuantitas sumber daya manusia yang belum sejalan dengan komposisi kebutuhan jabatan untuk pelaksanaan tugas
- b. Peraturan di bidang pengelolaan Kekayaan negara, Piutang Negara dan Lelang yang kurang memadai

3. Opportunities

- a. Wilayah Kerja yang potensial
- b. Potensi lelang dan utilisasi BMN yang semakin besar
- c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam menyikapi kekurangan sumber daya

4. Threats

Tidak terlayannya wilayah kerja secara optimal karena kurang optimalnya sumber daya

Dari hasil analisis tersebut maka dapat ditentukan faktor-faktor kunci keberhasilan yang akan menentukan pencapaian visi dan misi yang ditetapkan. Faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut merupakan hasil dari analisis lingkungan internal dan eksternal dijabarkan sebagai berikut :

1. Ketersediaan dan kemampuan personil

Faktor dominan berupa ketersediaan dan kemampuan personil secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

a. Ketersediaan personil

Ketersediaan personil merupakan jumlah ideal pegawai yang dapat melaksanakan tugas yang harus dikerjakan. Saat ini KPKNL Tangerang I memiliki 30 (tiga puluh) orang personil yang siap untuk mengerjakan tugas-tugas operasional maupun tugas-tugas administratif yang akan mendukung pelaksanaan tugas operasional.

Dari 30 (tiga puluh) orang tersebut terdapat 2 (dua) orang pegawai yang mengemban jabatan fungsional Pelelang, dan 2 (dua) orang penilai.

Jumlah pegawai tersebut secara umum masih terdapat ketidakseimbangan dengan komposisi yang diperlukan, terutama dalam tugas pengurusan Piutang Negara dan Pelaksanaan Lelang.

2. Sarana dan prasarana yang sangat menunjang

Sarana dan prasarana yang saat ini dimiliki oleh KPKNL Tangerang I merupakan modal dan landasan yang penting untuk mendukung tercapainya visi dan misi instansi. Sarana dan prasarana penting yang secara langsung menunjang pelaksanaan tugas operasional KPKNL Tangerang I terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

a. Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan administratif

Sarana dan prasarana penunjang kegiatan administratif terdiri dari perangkat-perangkat komputer yang cukup tersedia dan dapat bekerja dengan baik sehingga dapat digunakan untuk menunjang pengolahan data administratif dengan memadai. Perangkat-perangkat tersebut tersebar di masing-masing seksi sesuai dengan beban kerja serta kebutuhan masing-masing seksi. Selain itu keberadaan gedung yang representatif dengan ruang penyimpanan berkas (rumah berkas) yang memadai sangat mendukung kegiatan pengolahan data dan penyimpanan data yang sangat penting untuk mendokumentasikan setiap kegiatan yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan.

b. Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan operasional

Sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional diwujudkan dalam bentuk tersedianya perangkat-perangkat komputer yang dikhususkan untuk pengolahan data atau penyelesaian produk-produk hukum yang merupakan tugas operasional KPKNL Tangerang I sehingga untuk keperluan dan kebutuhan penunjang kegiatan operasional tidak perlu dikhawatirkan.

3. Wilayah Kerja

Wilayah kerja KPKNL Tangerang I yaitu meliputi wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Wilayah tersebut merupakan wilayah kerja yang cukup potensial untuk dikelola. Hal ini dikarenakan Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan merupakan kota penyangga Ibu Kota Jakarta sehingga perkembangan wilayahnya sangat pesat. Wilayah kerja yang potensial tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk menunjang tercapainya target pencapaian hasil pengurusan serta implementasi dari visi dan misi yang dicanangkan.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Sesuai dengan konsep manajemen kinerja yang diterapkan Kementerian Keuangan, maka tujuan strategis dipetakan dalam suatu peta strategi. Peta strategi Kemenkeu *Three* KPKNL mempunyai empat perspektif sesuai dengan peta strategi yang terdapat pada Kemenkeu *One* DJKN dan Kemenkeu *Two* Kanwil DJKN, yaitu *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, *Learning and Growth Perspective*. Empat perspektif tersebut kemudian diuraikan dalam Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama dengan peta strategi untuk tahun 2021 sebagai berikut:

VISI : Mengelola kekayaan Negara secara profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di Lingkungan KPKNL



B. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja KPKNL Tangerang I tahun 2021 sesuai dengan peta strategis Kemenkeu *Three* tahun 2021 terdiri dari 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama. Rincian selengkapnya tentang SS dan IKU tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Penetapan Sasaran Strategis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang I

SASARAN STRATEGIS 1 Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal			
Indikator Kinerja	Kode IKU	Target	Realisasi
1. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	1a-CP	62%	74,87%
2. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	1b-CP	100% Rp14.948.899.966,-	220,35% Rp32.940.627.084,-
3. Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	1c-CP	100%	10,75%

SASARAN STRATEGIS 2 Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa			
Indikator Kinerja	Kode IKU	Target	Realisasi
1. Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang	2a-CP	88	96,88
2. Persentase Realisasi Pokok Lelang	2b-CP	100% Rp202.000.000.000,-	216,71% Rp437.759.514.648,-

SASARAN STRATEGIS 3 Birokrasi dan Layanan Publik yang <i>Agile</i> , Efektif, dan Efisien			
Indikator Kinerja	Kode IKU	Target	Realisasi
1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	3a-CP	4,57	4,67

SASARAN STRATEGIS 4 Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif			
Indikator Kinerja	Kode IKU	Target	Realisasi

KPKNL TANGERANG I

1.	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikasi	4-CP	100% 11	100% 11
2.	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	4b-CP	100% 27	111,11% 30
3.	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	4c-CP	22%	2.26%

SASARAN STRATEGIS 5 Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif				
Indikator Kinerja		Kode IKU	Target	Realisasi
1.	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	5a-CP	100% 15	106,67% 16
2.	Persentase Produktivitas Lelang	5b-CP	35%	42,36%
3.	Persentase Pelaksanaan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i>	5c-CP	92%	100%
4.	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	5d-CP	12,5%	0%

SASARAN STRATEGIS 6 Edukasi yang Efektif				
Indikator Kinerja		Kode IKU	Target	Realisasi
1.	Tingkat Efektifitas Edukasi dan Komunikasi	6a-N	91	92,86

SASARAN STRATEGIS 7 Pegawasan dan Pengendalian yang Efektif				
Indikator Kinerja		Kode IKU	Target	Realisasi
1.	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	7a-CP	100%	100%
2.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	7b-CP	97%	100%

SASARAN STRATEGIS 8 SDM yang Kompeten				
--	--	--	--	--

KPKNL TANGERANG I

	Indikator Kinerja	Kode IKU	Target	Realisasi
1.	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	8a-N	75%	100%

SASARAN STRATEGIS 9				
Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>				
	Indikator Kinerja	Kode IKU	Target	Realisasi
1.	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	9a-N	75	97
2.	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	9b-N	80	98,63

SASARAN STRATEGIS 10				
Pengelolaan Anggaran yang Optimal				
	Indikator Kinerja	Kode IKU	Target	Realisasi
1.	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	10a-CP	95,5%	95,72%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja KPKNL Tangerang I tahun 2021 dilakukan melalui evaluasi dan pengukuran sasaran dan kinerja kegiatan. Evaluasi dan pengukuran kinerja tersebut dilakukan melalui pengukuran pencapaian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama Kemenkeu *Three* KPKNL yang dituangkan dalam ikhtisar yang disebut dengan Nilai Kerja Organisasi (NKO) sebagai berikut:

Capaian Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang I

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62,00%	74,87%	120,76%	120,00%
		a. Tingkat Kesesuaian SBSK K/L Baru (2021)	Bobot 75%	77,21%		
		b. Monev Tingkat Kesesuaian SBSK Th. 2020	Bobot 25%	68,87%		
		Persentase Penerimaan negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	Rp14.948.899.966,- Rp5.263.200.000,-	Rp32.940.627.084,- Rp16.475.651.885,-	220,35%	120,00%

		a. PNBP Pengelolaan BMN	Rp171.699.966,-	Rp189.354.782,-		
		b. PNBP Piutang Negara	Rp9.514.000.000,-	Rp16.275.620.417,-		
		c. PNBP Lelang				
		Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara (Saldo PNDS s.d. 2017)	Rp14.796.238.297,-	Rp1.591.223.498,-	10,75%	10,75%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang	88	96,88	110,09%	110,09%
		Persentase Realisasi Pokok Lelang	Rp202.000.000.000,-	Rp437.759.514.648,-	216,71%	120,00%
		a. Pokok Lelang Kelas I	Rp152.000.000.000,-	Rp312.679.879.148,-		
		b. Pokok Lelang Pegadaian	Rp50.000.000.000,-	Rp125.079.635.500,-		
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang <i>Agile</i> , Efektif, dan Efisien	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,57	4,67	102,19%	102,19%
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikasi	11	11	100,00%	100,00%
		Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	27	30	111,11%	111,11%
		Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	22,00%	2,26%	-	120,00%

KPKNL TANGERANG I

5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	15	16	106,67%	106,67%
		Persentase Produktivitas Lelang	25,00%	42,36%	169,44%	120,00%
		Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92,00%	100,00%	108,70%	108,70%
		Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	12,50%	0,00%	0,00%	120,00%
6	Edukasi yang Efektif	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	91	92,86	102,04%	102,04%
7	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	85,00%	100,00%	117,65%	117,65%
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	97,00%	100,00%	103,09%	103,09%
8	SDM yang Kompeten	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	75,00%	120,00%	120,00%	120,00%
9	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	75	97	128,92%	120,00%
		Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80	98,63	123,29%	120,00%
10	Pengelolaan Anggaran yang Optimal	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,50%	95,72%	100,23%	100,23%
Nilai Kerja Organisasi					104,88%	

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan

Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memerlukan evaluasi sebagai analisis terhadap kegiatan yang dilakukan serta pencapaian sasaran dan tingkat kinerja yang diinginkan. Evaluasi terhadap kegiatan serta kinerja yang dihasilkan tersebut dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja utama Kemenkeu *Three* KPKNL dan pengukuran kinerja kegiatan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 yang berkaitan dengan disertai analisis atas pencapaian kerjanya.

Pada tahun 2021 KPKNL Tangerang I memiliki 10 Sasaran Strategis (SS) Kemenkeu *Three* yaitu:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
3. Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien;
4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif;
5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif;
6. Edukasi yang Efektif;
7. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif;
8. SDM yang Kompeten;
9. Organisasi yang *Fit For Purpose*;
10. Pengelolaan Anggaran yang Optimal.

Untuk mencapai 10 (sepuluh) SS tersebut, ditetapkan 20 (dua puluh) IKU Kemenkeu *Three*. Berdasarkan hasil pengukuran, rata-rata tingkat pencapaian sasaran pada tahun 2021 sebesar 104,88%, adapun rincian pencapaian Sasaran Strategis dan IKU Kemenkeu *Three* sebagai berikut:

**SS KPKNL.1 Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal
capaian kinerja 3 (tiga) IKU yaitu:**

1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Penggunaan Barang Milik Negara yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara atas pengelolaan Aset Negara termasuk exsisting luasan BMN satker yang sedang dimanfaatkan dengan persetujuan Pengelola Barang.

Barang milik negara dimaksud merupakan BMN berupa tanah dan/atau bangunan/gedung kantor dan rumah negara/mess yang telah selesai dilakukan pengukuran Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) dibandingkan dengan seluruh jumlah BMN berupa tanah dan/atau bangunan/gedung kantor dan rumah negara/mess pada wilayah kerja KPKNL Tangerang I.

Capaian IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK Triwulan Tahun 2021 didapatkan dari 11 NUP perhitungan penggunaan BMN pada tahun 2021, dan 25 NUP dari Optimalisasi penggunaan BMN sebagaimana telah dihitung pada tahun 2020.

Tantangan dalam pencapaian IKU lebih kepada kendali IKU yang rendah, karena peranan satuan kerja / Kuasa Pengguna Barang dalam penggunaan BMN yang tinggi namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. KPKNL selaku pengelola barang hanya dapat melakukan pendataan melalui formulir SBSK. Diharapkan kedepan IKU ini dapat memberikan rekomendasi dan efek lebih baik dalam penggunaan BMN pada satuan kerja.

1b-CP Persentase Penerimaan negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)

Penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara merupakan nilai penerimaan negara yang telah masuk ke kas negara dan nilai penghematan belanja yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan negara.

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Untuk tahun 2021, kinerja penerimaan negara berupa PNBP diakui apabila nilai penerimaan telah masuk ke rekening kas negara. Hal ini dapat dibuktikan dengan:

- 1) berita acara atau surat jawaban atau data pada aplikasi Online Monitoring SPAN dari Kanwil Perbendaharaan/KPPN setempat terkait dengan data penerimaan negara atas mata anggaran penerimaan sebagai rincian di bawah ini atau

2) data dari Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) baik yang disetor oleh bendahara penerima KPKNL (untuk PNBP piutang negara dan lelang) maupun SSBP dari satuan kerja yang melakukan pemanfaatan BMN.

Nilai penerimaan negara pengelolaan kekayaan negara terdiri dari tiga komponen yaitu PNBP Pengelolaan BMN dengan target Rp5.263.200.000,00, PNBP Piutang Negara dengan target Rp171.699.966,00 dan PNBP Lelang dengan target Rp9.514.000.000,00.

Selama tahun 2021 KPKNL Tangerang I berhasil merealisasikan PNBP Pengelolaan Negara sebesar Rp16.475.651.885,00, PNBP Piutang Negara sebesar Rp189.354.782,00 dan PNBP Lelang sebesar Rp16.275.620.084,00 sehingga realisasi IKU tercapai sebesar 220,35%.

1c-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (Saldo PNDP s.d. 2017)

Tingkat Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2016 atau sebelumnya, pada akhir tahun (31 Desember 2021) diharapkan turun menjadi 0%.

Pada tahun 2021, target tingkat penurunan *outstanding* piutang negara untuk KPKNL Tangerang I adalah sebesar Rp14.796.238.297,00. Realisasi tingkat penurunan *outstanding* piutang negara sepanjang 2021 sebesar Rp1.591.223.498,00.

SS KPKNL.2 Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa capaian kinerja 2 IKU yaitu:

2a-CP Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang

Pada KPKNL Tangerang I perhitungan indeks ketepatan waktu penyelesaian kekayaan negara merupakan rata-rata dari 14 kegiatan utama KPKNL yang tercantum dalam SOP layanan unggulan KPKNL, diantaranya adalah penetapan status penggunaan BMN,

persetujuan/penolakan penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan, penetapan jadwal lelang, penilaian dalam rangka pemanfaatan BMN sampai dengan penerbitan surat pernyataan piutang negara lunas. Penilaian ini dilakukan setiap akhir triwulan untuk kemudian dihitung rata-rata nilai tahunannya.

Realisasi rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara pada KPKNL Tangerang I tercapai 96,88 dari target ditetapkan yaitu sebesar 88, sehingga capaian kinerjanya sebesar 110,09%.

2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang

Persentase hasil pokok lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang pada KPKNL merupakan pokok lelang dari pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I / Jabatan Fungsional Pelelang dan pelaksanaan lelang oleh Pegadaian dalam periode tertentu.

Pada tahun 2021 KPKNL Tangerang I diberikan target sebesar Rp202.000.000.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp437.759.514.648,00 atau sebesar 216,71%.

SS KPKNL.3 Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien capaian kinerja 1 (satu) IKU yaitu:

3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (quick win). Survei dilakukan dengan memberikan kuisioner kepada

pengguna layanan untuk menilai kualitas layanan yang telah diberikan oleh KPKNL Tangerang I.

Realisasi indeks kepuasan pelayanan publik yang prima pada tahun 2021 sebesar 4,67 atau sebesar 102,19% dari target sebesar 4,57. Kepuasan pengguna layanan pada kantor pelayanan diukur dari penghitungan kuesioner yang diisi oleh pengguna layanan di KPKNL Tangerang I, baik layanan pengelolaan kekayaan negara, layanan penilaian, layanan lelang serta layanan pengurusan piutang negara, KPKNL Tangerang I ke depannya akan terus meningkatkan pelayanan demi meningkatkan kepuasan pengguna layanan.

SS KPKNL.4 Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

capaian kinerja 2 (dua) IKU yaitu:

4a-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikasi

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Dalam kaitannya dengan kekayaan negara, kegiatan tata kelola meliputi seluruh siklus pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, kekayaan negara dipisahkan, penilaian, piutang negara, dan lelang. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Tata kelola yang akuntabel adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan sertipikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah. Barang milik negara berupa tanah harus disertipikasikan atas nama pemerintah ri c.q. Kementerian/lembaga yang bersangkutan.

Dari target persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan adalah sebesar 11 bidang tanah, KPKNL Tangerang I berhasil melakukan sertifikasi bidang tanah BMN sebesar 11 bidang tanah, sehingga capaian dapat terealisasi sebesar 100%.

Tantangan dari pelaksanaan IKU ini yaitu KPKNL Tangerang I hanya sebagai penghubung antara Satuan Kerja yang memiliki BMN berupa tanah yang belum disertifikatkan atau sertifikatnya belum sesuai ketentuan dengan Kantor Pertanahan, sehingga tingkat kendalinya rendah.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini antara lain terdapat BMN tanah yang pada saat pelaksanaan diketahui belum free and clear sehingga belum dapat dilaksanakan sertifikasi, sehingga harus mencari target bidang tanah baru untuk disertifikatkan.

4b-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset).

Dari target persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) adalah sebesar 27 aset, KPKNL Tangerang I berhasil melakukan evaluasi BMN sebesar 27 aset, sehingga capaian dapat terealisasi sebesar 100%.

4c-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu.

Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN).

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Pada tahun 2021 KPKNL Tangerang I diberikan target sebesar 22%, sementara tingkat deviasi yang diperoleh adalah 2,26%.

SS KPKNL.5 5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

capaian kinerja 4 (empat) IKU yaitu:

5a-CP Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN

IKU Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan BKPN Lunas, BKPN Penarikan, BKPN dikembalikan, dan BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

Dari target persentase efektifitas penyelesaian BKPN adalah sebesar 15 BKPN, KPKNL Tangerang I berhasil melakukan penyelesaian BKPN sebesar 16 BKPN., sehingga capaian dapat terealisasi sebesar 106,67%.

5b-CP Persentase Produktivitas Lelang

Produktifitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.

KPKNL Tangerang I pada tahun 2021 mendapatkan target sebesar 35%, frekuensi lelang terealisasi sebanyak 687 dan yang laku adalah sebanyak 291 sehingga persentase produktifitas lelang sebesar 42,36%.

5c-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. E-auction ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka).

Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjangkau peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.

Implementasi e-auction meliputi:

- 1) Pelaksanaan Lelang e-Auction adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.
- 2) E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account)

Target capaian e-Auction dan e-Conventional Auction adalah sebesar 92% dari realisasi frekuensi lelang.

KPKNL Tangerang I pada tahun 2021 capaian persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction yaitu sebesar 100%.

5d-CP Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian).

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari:

- a. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
- b. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang* dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Dari target deviasi data PNBP fungsional DJKN sebesar 12,5%, KPKNL Tangerang I berhasil terealisasi sebesar 0%.

SS KPKNL.6 Edukasi yang Efektif Capaian kinerja 1 (satu) IKU yaitu:

6a-N Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi digunakan untuk mengukur persepsi peserta atas 1) tingkat pemahaman, 2) kualitas materi, 3) kualitas fasilitator, dan 4) kualitas pendukung pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan. Proses edukasi dan komunikasi dilakukan dengan media seperti pelatihan, sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, atau layanan konsultasi Area Pelayanan Terpadu.

IKU ini mengukur edukasi yang dilakukan oleh KPKNL kepada pihak eksternal, seperti satuan kerja (K/L), pemohon lelang, pembeli lelang, masyarakat, dan lainnya. Kegiatan

edukasi ini dilakukan paling tidak sebanyak dua kali dalam setahun (setiap semester satu kali).

Pelaksanaan pengukuran tingkat efektifitas edukasi ini dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner kepada peserta sesaat setelah kegiatan selesai. Hal ini akan menjadi bertujuan untuk:

- 1) meningkatkan kualitas pemahaman para pengguna layanan sehingga lebih patuh terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh DJKN, dan
- 2) mengenalkan instansi DJKN kepada masyarakat
- 3) meningkatkan kualitas pelayanan dan SDM pada KPKNL

Nilai tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi yang diperoleh KPKNL Tangerang I pada tahun 2021 adalah sebesar 92,86 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 91.

SS KPKNL.7 Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif capaian kinerja 2 (dua) IKU yaitu:

7a-CP Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada K/L terutama terkait aspek utilisasi-nya. IKU ini difokuskan pada pemantauan utilisasi berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang.

Total capaian Iku adalah sebesar 100%, jumlah ini melebihi dari target yang ditetapkan tahun 2021 yaitu sebesar 85%.

7b-CP Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti

Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan adalah serangkaian proses kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Itjen yang telah ditetapkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Rekomendasi teamcentral adalah operasional/administratif adalah rekomendasi dari ITJEN yang berkaitan dengan penerapan kebijakan, ketentuan, dan peraturan yang berlaku (selain polrec). Saldo rekomendasi adalah saldo mulai tahun 2012 ditambah saldo periode tahun sebelum tahun berjalan (2020) yang harus ditindaklanjuti pada tahun 2021.

Rekomendasi yang selesai/ditetapkan tuntas dihitung berdasarkan:

- a. Status rekomendasi telah closed-verified pada TeamCentral.
- b. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti (sesuai ketentuan pada PMK 237/PMK.09/2016 tentang TKPI) yaitu rekomendasi yang telah dibahas oleh Itjen, klien pengawasan dan UKI, serta disampaikan kepada Inspektur Jenderal melalui Inspektorat mitra pengawasan.

KPKNL Tangerang I pada tahun 2021 telah menyelesaikan seluruh tindak lanjut atas rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

**SS KPKNL.8 SDM yang Kompeten
capaian kinerja 1 (satu) IKU yaitu:**

8a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Para pegawai di KPKNL Tangerang I dituntut untuk selalu mengembangkan kompetensi yang dimiliki. Kompetensi pegawai salah satunya ditunjukkan dari pendidikan dan pelatihan (diklat) serta kegiatan lain yang pernah diikuti.

Pendidikan dan pelatihan (diklat) serta kegiatan lain tersebut meliputi pendidikan gelar Diploma I, Diploma III, S1/ DIV, atau gelar akademik lainnya; maupun pendidikan non-gelar yang meliputi diklat substansif dasar (DTSD), diklat substansif spesialisasi, internship/on the job training, workshop, bimbingan teknis, in-house training terkait bidang teknis

Untuk tahun 2020, evaluasi dilakukan untuk pegawai dengan jabatan pejabat eselon IV dan pelaksana

Total capaian Iku adalah sebesar 120%, jumlah ini melebihi dari target yang ditetapkan tahun 2021 yaitu sebesar 100%.

**SS KPKNL 9. Organisasi yang Fit For Purpose
capaian kinerja 2 (dua) IKU yaitu:****9a-N Nilai Hasil Review Pengelolaan Kinerja**

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Peraturan terkait pengelolaan kinerja berbasis BSC ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 467/KMK.01/2014 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Total capaian IKU adalah sebesar 97, jumlah ini melebihi dari target yang ditetapkan tahun 2021 yaitu sebesar 75.

9b-N Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

Tingkat efektivitas FGD kode etik merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai feedback peserta terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan.

Parameter yang diukur berdasarkan beberapa aspek yaitu delivery (cara penyampaian materi oleh Pejabat Administrator), understanding (pemahaman peserta terhadap materi FGD), learning enthusiasm (antusiasme pegawai terhadap kegiatan FGD), contribution to learning (dampak kegiatan FGD kepada peningkatan kapasitas pegawai). Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO). Kegiatan FGD dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan Forum Group Discussion. Fokus materi FGD akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal melalui surat Kepala Biro SDM atas nama Sekretaris Jenderal

kepada Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain terkait kode etik, akan terdapat tema lain dalam pelaksanaan FGD.

Target capaian terhadap IKU ini di KPKNL Tangerang selama tahun 2021 adalah sebesar 80, sedangkan capaian yang diraih adalah sebesar 98,63 sehingga tercapai sebesar 123,29%.

SS KPKNL.10 Pengelolaan Keuangan yang Optimal

capaian kinerja 1 (satu) IKU yaitu:

10a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi.

Target persentase kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2021 adalah 95%, KPKNL Tangerang I berhasil mendapatkan realisasi sebesar 95,72%. Sehingga pencapaian kinerja terkait kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2021 sebesar 100,23% dari target yang ditetapkan.

Selain adanya permasalahan dalam pencapaian kinerja terkait Sasaran Strategis Organisasi, KPKNL Tangerang I juga menghadapi beberapa permasalahan/kendala dalam menjalankan tugas dan fungsi Non Sasaran Strategis, antara lain:

- 1) Pada tahun 2021, Indonesia masih dalam keadaan kejadian luar biasa yang merupakan efek dari merebaknya Pandemi *Covid 19* sehingga hampir seluruh kegiatan yang dilakukan oleh KPKNL Tangerang I mengalami kendala dalam hal kegiatan yang memerlukan tatap muka langsung dengan para *stakeholder*.
- 2) Permasalahan/kendala dalam kegiatan hukum dan informasi:
Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Hukum dan Informasi dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a) Beberapa keterbatasan pada penggunaan Aplikasi SIBANKUM DJKN yang mengakibatkan data dalam aplikasi berpotensi diakses oleh pihak-pihak yang tidak berwenang dimana tidak ada menu Otorisasi dan penggantian Username dan password. Disamping itu, perlu disediakan menu koreksi/pembalik pada aplikasi apabila tahap perkara sudah dinyatakan selesai untuk menambah keakuratan penyediaan data;
 - b) Biaya penanganan perkara khususnya untuk pengambilan putusan, daftar banding/kasasi/PK, daftar bukti/leges dirasakan kurang. Kendala ini bertambah dengan sulitnya mempertanggungjawabkan biaya-biaya dimaksud karena pihak pengadilan tidak bersedia mengeluarkan kuitansi resmi;
 - c) Belum ada mekanisme rekonsiliasi perkara dengan Biro Bankum Kemenkeu. Tahapan penanganan perkara baru dapat diketahui ketika KPKNL menanyakan hal tersebut kepada Biro Bankum sehingga KPKNL selalu terlambat mengetahui perkembangan penyelesaian perkara.
- 3) Dalam pelaksanaan kegiatan penilaian baik itu dalam melaksanakan penilaian barang jaminan dan penilaian BMN masih ditemui beberapa kendala dan masalah yang dapat menghambat dan mengganggu kelancaran tugas. Kendala dan masalah yang sering dijumpai dalam pelaksanaan tugas pada seksi Pelayanan Penilaian, antara lain:
 - a) Terbatasnya data pembanding disuatu daerah, sehingga tim penilai mengalami kesulitan memperoleh data pembanding disekitar lokasi objek penilaian;
 - b) Kelengkapan data dari Satker kadang belum lengkap.

C. Kinerja Lainnya

Tahun 2021 di tengah situasi Pandemi *Covid 19*, menjadi tahun yang penuh tantangan bagi KPKNL Tangerang I, baik secara target kinerja maupun kegiatan di luar tugas pokok dan fungsi yang harus diikuti oleh KPKNL Tangerang I. Setelah di tahun 2020 KPKNL Tangerang I mendapatkan predikat sebagai Kantor Berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 hal ini menjadi permulaan untuk membuktikan dan mempertahankan integritas dalam memberikan layanan kepada seluruh stakeholder KPKNL Tangerang I. Predikat hanyalah gelar tanpa arti semata jika kemudian masih ada transaksi dalam memberikan pelayanan yang menggadaikan integritas.

Kemudian, berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan laporan keuangan, KPKNL Tangerang I mendapatkan penghargaan Satuan Kerja Terbaik Kedua dalam Kinerja Indikator Deviasi Halaman III DIPA Tahun 2021 oleh KPPN Tangerang.

BAB IV PENUTUP

Rencana pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Tangerang I tahun 2021 ditetapkan sesuai dengan Peta Strategis Kemenkeu *Three* KPKNL yang terdiri dari 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Berdasarkan evaluasi kinerja, rata-rata tingkat pencapaian kinerja KPKNL Tangerang I pada tahun 2021 sebesar 104,88%, hal ini menunjukkan tingkat pencapaian kinerja KPKNL Tangerang I tahun 2021 secara rata-rata telah melampaui target yang ditetapkan. Walaupun secara keseluruhan telah melampaui target namun masih terdapat pencapaian sasaran maupun indikator kinerja yang belum mencapai target, yaitu persentase produktifitas lelang.

Dalam pencapaian kinerja tahun 2021, KPKNL Tangerang I menghadapi berbagai kendala diantaranya:

1. Adanya Pandemi *Covid 19* yang terjadi menyeluruh di wilayah NKRI;
2. Banyaknya potensi gugatan/tuntutan atas pelaksanaan pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang;
3. Kurangnya kesadaran satker untuk menyampaikan laporan pengawasan dan pengendalian BMN tepat waktu;
4. Masih terdapat pegawai yang belum memenuhi standar kompetensi jabatan minimal sehingga kualitas pekerjaan yang dihasilkan belum optimal.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2021 dan kondisi/permasalahan yang terjadi, seluruh personil KPKNL Tangerang I bertekad untuk meraih prestasi kinerja yang lebih baik dengan melaksanakan rencana kegiatan tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan optimal.

Hal-hal yang akan dilakukan KPKNL Tangerang I dalam rangka pencapaian target 2022 secara optimal sehingga menghasilkan capaian yang lebih baik adalah :

1. Meningkatkan pelayanan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang;
2. Melaksanakan penggalian potensi utilisasi kekayaan negara, piutang negara dan lelang;

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan cara mengikutsertakan pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti diklat/pelatihan/workshop yang diselenggarakan internal atau eksternal DJKN;
4. Penatausahaan pengurusan piutang dan lelang negara, serta Barang Milik Negara dengan sistem komputerisasi yang memadai.

Demikian Laporan Kinerja Tahunan 2021 ini disusun guna memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis yang dibebankan kepada KPKNL Tangerang I pada tahun anggaran 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan 2021 ini adalah yang kelima kali sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014, oleh karena itu masih terdapat banyak kekurangsempurnaan, kedepannya segala kekurangsempurnaan itu akan kami lakukan perbaikan.

TERIMA KASIH

Lampiran

